

[Click here and write your Article Category](#)

Sosialisasi Penggunaan Aplikasi POLDA Jambi kepada Petugas Command Center

Imti Tsalil Amri, S.Kom., M.Kom¹, Brestina Gultom, S.Kom., M.S.I², Rico, S.Kom., M.S.I³, Derist Touriano, S.T., M.Kom⁴, Akhmad Faisal Husni, S.Kom., M.Kom⁵, Adam Afriansyah, S.Kom., M.Kom⁶, Ferdianto Pangabea⁷

¹ Imti Tsalil Amri, S.Kom., M.Kom, Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia

² Brestina Gultom, S.Kom., M.S.I, Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia

³ Rico, S.Kom., M.S.I, Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia

⁴ Derist Touriano, S.T., M.Kom, Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia

⁵ Akhmad Faisal Husni, S.Kom., M.Kom, Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia

⁶ Adam Afriansyah, S.Kom., M.Kom, Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia

⁷ Ferdianto Pangabea, Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: February 00, 00
Revised: March 00, 00
Available online: April 00, 00

KEYWORDS

Five words maximum, comma separated

CORRESPONDENCE

Phone: +62 (0751) 12345678
E-mail: first_author@affiliation.xx.xx

A B S T R A C T

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis petugas Command Center POLDA Jambi dalam mengoperasikan Aplikasi POLISI Jambi, sebagai bagian dari upaya modernisasi pelayanan kepolisian berbasis teknologi informasi. Dalam konteks transformasi menuju tata kelola keamanan yang demokratis dan responsif terhadap masyarakat, pemanfaatan aplikasi ini diharapkan mampu memperkuat fungsi kepolisian dalam hal pengawasan, koordinasi, dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui pendekatan partisipatif berupa penyampaian materi, diskusi interaktif, dan simulasi operasional aplikasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap fitur-fitur aplikasi, termasuk integrasi data, visualisasi dashboard, dan sistem peringatan dini (early warning system). Kegiatan ini menekankan pentingnya optimalisasi Command Center sebagai pusat kendali informasi yang mampu mendukung pengambilan keputusan secara real-time dalam penanganan krisis maupun pelayanan publik yang efisien. Melalui kegiatan ini, diharapkan POLDA Jambi dapat mengimplementasikan prinsip pemolisian modern yang proaktif, transparan, dan berbasis data guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Kata kunci: *pengabdian masyarakat, aplikasi POLISI Jambi, Command Center, teknologi informasi, pelayanan publik, pemolisian modern*

Latar Belakang

Dalam masyarakat sipil yang modern, setiap masyarakat dituntut untuk memproduksi dan berguna atau setidaknya dapat menghidupi dirinya sendiri serta dapat saling menghidupi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka yang tidak memproduksi dianggap sebagai beban atau benalu masyarakat. Tindak kejahatan atau kerusakan dapat merusak atau menghancurkan produktifitas dan dapat menghancurkan masyarakat. Dalam masyarakat modern tugas polisi adalah menjaga agar jalannya produksi yang menyejahterakan masyarakat tersebut jangan sampai terganggu atau hancur karena tindak kejahatan dan kerusakan. Tercakup dalam pengertian menjaga jalannya produktivitas dan tujuan utama dalam upaya menjamin keberadaan manusia dan masyarakatnya yang beradab (Suparlan 1999 b).

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi (Suparlan;1999). Fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dalam proses tidak dirugikan. Menurut Rahardjo, 2000 : "Sosok Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok masyarakat.

Dengan prinsip tersebut diatas masyarakat mengharapkan adanya, perubahan dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya) atau yang cocok dengan masyarakatnya. Harapan masyarakat kepada polisi adalah sosok polisi yang
Jurnal Pengabdian Universitas Prima Indonesia Medan

cocok atau sesuai dari masyarakatnya dan hal tersebut tidak dapat ditentukan oleh polisi sendiri. Dapat dikatakan bahwa polisi adalah cerminan dari masyarakatnya, masyarakat yang bobrok jangan berharap mempunyai polisi yang baik (Rahardjo, 1999).

Fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, yaitu mempunyai : mempunyai tanggung jawab kusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bahtiar: 1994 :1). Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban/ gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut (Suparlan: 1999). Menurut Bayley 1994 :Untuk mewujudkan rasa aman itu mustahil dapat dilakukan oleh polisi saja, mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara bertindak polisi yang konvensional– yang dilibat oleh birokrasi yang rumit , mustahil terwujud melalui perintah-perintah yang terpusat tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lain (Kunarto, 1998,xi).

Dari bahasan di atas fungsi polisi bukanlah sebagai alat penguasa atau hanya untuk kepentingan pejabat pemerintah. Di dalam menciptakan tertib hukum, keamanan tidak dapat lagi dengan menggunakan kekuasaan atau alat paksa yang bersifat otoriter militeristik. Dalam masyarakat yang otoriter militeristik mempunyai ciri-ciri kekejaman dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri (Van den Berge, 1990, dalam Suparlan, 2001). Hampir di semua negara yang otoriter, gaji pegawai negeri sipil, polisi dan militer amat kecil, yang besar adalah fasilitas dan pendapatan atau tunjangan yang diterima karena jabatan yang didudukinya (Suparlan, 2001). Hal tersebut di dalam organisasi kepolisian dapat menimbulkan tumbuh dan berkembangnya sistem yang tidak fair dan orientasi para anggotanya bukan pada pelayanan masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari hal-hal yang diuraikan di atas, maka orientasi polisi untuk menciptakan suatu kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat diperlukan kepolisian yang demokratis dan cocok dengan masyarakatnya. Dengan mengacu pada acuan dasar demokrasi polisi dapat menunjukan adanya kesetaraan antara masyarakat dengan aparat kepolisiannya, polisi tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakatnya dan dalam tindakan pemolisiannya senantiasa berdasar pada supremasi hukum serta memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Adanya transparansi atau keterbukaan atas kinerjanya sebagai wujud pertanggung jawaban publik polisi (tidak lagi menganggap semua tugas polisi rahasia dan harus dirahasiakan). Untuk mengawasi dan mengontrol kinerja polisi agar tidak menyimpang dari hukum dan peraturan yang berlaku perlu adanya lembaga yang independent untuk melakukan pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi dengan harapan agar polisi dalam memberikan pelayanan keamanan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.

Dengan demikian maka prioritas pemolisian tidak hanya melihat dari sisi kepolisian saja melainkan juga melihat harapan dan keinginan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat. Gaya pemolisian yang dilakukan tidak lagi bersifat reaktif atau menunggu laporan/pengaduan atau perintah melainkan proaktif dan senantiasa menumbuhkan kreativitas dan inovasi –inovasi baru dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Untuk menentukan gaya pemolisian yang terbaik bagi masyarakat tidak hanya ditentukan atau diatur dari atas saja (top down) yang diatur secara sentralistik atau diseragamkan melainkan tumbuh atau muncul dari tingkat bawah yang disesuaikan dengan lingkungan masyarakatnya atau dengan sistem bottom up (desentralisasi).

Tujuan

Sosialisasi Penggunaan Aplikasi POLISI Jambi kepada Petugas Command Center.

Sasaran dan Target

Petugas Command Center

METHOD

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka dalam bentuk pelatihan yang mencakup pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan praktik langsung penggunaan aplikasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada 22 November 2021 di Aula POLDA Jambi, dengan peserta terdiri dari personel Command Center POLDA Jambi. Materi pelatihan mencakup pengenalan konsep Command Center modern, fitur-fitur aplikasi POLISI Jambi, serta simulasi kasus penggunaan dalam skenario operasional harian.

RESULTS AND DISCUSSION

Command Centre (CC) adalah ruang kendali yang dilengkapi teknologi canggih untuk memantau, mengoordinasikan, dan mengambil keputusan secara cepat dalam situasi penting. Meski identik dengan dunia militer, Command Centre juga banyak digunakan di sektor sipil seperti pemerintahan, bandara, dan industri, termasuk sebagai bagian dari manajemen krisis dan kelangsungan bisnis. Dalam konteks ini, CC menjadi pusat pengambilan keputusan dan koordinasi tim dalam menghadapi keadaan darurat, pemulihan, serta komunikasi publik. Saat ini, banyak pemerintah daerah membangun Command Centre sebagai upaya meningkatkan layanan publik dan mewujudkan Smart City.

Pengoptimalan Command Center

Pembangunan Command Centre oleh pemerintah daerah merupakan langkah strategis dalam upaya digitalisasi layanan publik. Namun, implementasi ini sering kali belum dimanfaatkan secara optimal; banyak Command Centre hanya difungsikan sebagai ruang pemantauan CCTV atau media konferensi daring. Padahal, dengan investasi yang cukup besar,

potensi Command Centre jauh lebih luas sebagai pusat kendali dan pengambilan keputusan berbasis data.

Menjawab tantangan ini, SKOTA by Lintasarta hadir dengan solusi menyeluruh, mulai dari pembangunan hingga optimalisasi Command Centre. Platform SKOTA Data by Lintasarta memungkinkan pengumpulan, integrasi, dan penyajian data secara real-time dari berbagai sumber, sehingga menjadi alat bantu strategis dalam pengambilan keputusan. Platform ini dilengkapi fitur seperti *Geospatial Analytics*, *Dashboard Visualization*, *Early Warning System*, dan *Predictive Analytics*, yang menjadikan Command Centre lebih bernilai, efisien, dan produktif. Solusi ini tidak hanya ditujukan untuk pemerintah daerah, tetapi juga dapat diterapkan pada sektor swasta dan korporasi yang membutuhkan sistem kendali operasional berbasis data untuk mendukung kelangsungan bisnis dan respons terhadap situasi krisis secara cepat dan terarah.

RENCANA KEGIATAN

No	Waktu	Kegiatan Pelatihan	Kegiatan Peserta	Pelaksana
1	15 Menit	a. Persiapan b. pembukaan	Mendengar-	Imti Tsalil
2	60 Menit	c. Pelaksanaan i. Menggali pengetahuan peserta tentang materi ii. Menjelaskan tentang materi	Memperhati-	Amri, S.Kom., M.Kom dan tim
3	30Menit	d. Penutupan		



Figure 1. Peserta PkM

CONCLUSIONS

Sosialisasi penggunaan aplikasi POLISI Jambi berhasil meningkatkan kompetensi petugas Command Center dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam pelayanan kepolisian. Kegiatan ini diharapkan menjadi pemicu optimalisasi Command Center sebagai bagian dari implementasi smart policing yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan kecepatan layanan kepada masyarakat.

ACKNOWLEDGMENT

Kami mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Adiwangsa Jambi dan pihak POLDA Jambi atas dukungan penuh yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

REFERENCES

- [1] Suparlan, P. (1999). "Konsep Polisi Protagonis dalam Masyarakat Modern".
- [2] Rahardjo, S. (2000). "Sosiologi Hukum dan Peran Polisi".
- [3] Bahtiar, A. (1994). "Fungsi Kepolisian dalam Menjaga Ketertiban".
- [4] Kunarto, H. (1998). "Paradigma Baru Kepolisian".
- [5] Bayley, D. H. (1994). "Police for the Future".